

Tim Permata Press



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

**UNDANG-UNDANG RI.
NOMOR 17 TAHUN 2008**

Tentang

PELAYARAN

&

**UNDANG-UNDANG RI.
NOMOR 43 TAHUN 2008**

Tentang

WILAYAH NEGARA

BESERTA PENJELASANNYA



Penerbit

PERMATA Press

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

**Disusun Oleh
Tim Redaksi "PERMATA PRESS"**

**Desain Sampul & Lay-out
M. YASIR ARAFAT**

**Penerbit :
"PERMATA PRESS"**

KATA PENGANTAR

Bahwa Negara Republic Indonesia adalah Negara kesatuan, sebagai Negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk di kelola dan di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana di amanatkan Undang-Undang dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memperlancar pembangunan di Indonesia perlu untuk memperhatikan di sector perhubungan laut atau pelayaran dan serta di susun system transportasi yang baik dan memperhatikan sumber daya manusia, untuk menciptakan tenaga yang trampil dalam perhubungan laut/pelayaran, tidak bisa di pungkiri Negara Republic Indonesia adalah Negara yang terbesar dalam menyediakan tenaga kerja bidang kelautan atau pelayaran dan untuk menjamin perlindungan ketenagaan kerjaan di bidang ini pemerintah berkewajiban untuk membentuk undang-undang pelayaran yang tidak lepas dari perjanjian internasional maka penerbit berusaha untuk menyusun dan menerbitkan buku berjudul UNDANG-UNDANG PELAYARAN NO. 17 TAHUN 2008 serta Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang WILAYAH NEGARA yang mengkaji perbatasan-perbatasan meliputi daratan, perairan, pedalan, perairan kepulauan dan laut tutorial beserta dasar laut, dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Harapan kami dari penerbit mudah-mudahan buku ini berguna bagi kalayak umum atau pihak yang berkepentingan.

Permata Pres

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958.. Penjelasan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention	4
UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	13
Penjelasan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	151
UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	234
Penjelasan atas UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	284
UU RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	340
Penjelasan atas UU RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	355
UU RI Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	375
Penjelasan atas UU RI Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	380
PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	382
Penjelasan atas PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	388
PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	390
Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	390
Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008	400
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang WILAYAH NEGARA	413